

‘Kami’ yang Menolak Terasing dan Putus¹

Esai oleh: Muhammad Nanda Fauzan (Juara Kedua Lomba Esai yang Diinisiasi oleh Dewan Kearsipan dan Perpustakaan Banten, 2019)

“Tak mungkin ada T.S Eliot tanpa John Donne, tapi mulai sekarang, tak ada pula John Donne tanpa T.S Eliot,” ucap Carlos Fuentes, kepada para peserta seminar *Literatura; Creacion y Tradicion* di El Colegio Nacional, pada penghujung tahun 2000 silam.

Dilihat dari sudut manapun, saya tak bisa menampik pernyataan provokatif itu. Bahwa tak mungkin ada kebaruan dalam sastra tanpa topangan tradisi sastra sebelumnya. Sang pendahulu melulu jadi pijakan sang pembaharu, dan keduanya saling berkelindan dalam satu komunitas yang koherendi sejarah kesastraan. Fuentes memberi judul ceramahnya itu *El Decalogo Para el Joven Escritor Latinoamericano*,² sepuluh perintah kepada penulis muda amerika-latin.

Fuentes menghabiskan hidupnya di kota Meksiko, dan sedikit beruntung memiliki akar yang kokoh sekaligus utuh, kita bisa menyebut nama Juana Ines de la Cruz (1648-1695) misalnya, sebagai penyair yang tumbuh di kota yang sama. Juga di lain sisi, Fuentes adalah peneroka bagi penulis di bawah generasinya, Guadalupe Nettel atau Valeria Luiselli. Mereka bertaut begitu akrab dalam kanon sastra kota Meksiko.

Sebagai kota yang ‘matang’, dengan jejak masa lampau yang kompleks, heterogenitas budaya, juga kesadaran mengarsip tulisan yang kuat, maka hal itu lumrah belaka. Sebagai implikasi positif, Kota Meksiko memiliki segudang Sastrawan yang selalu berhasil membuat *kitabungah* sekaligus iri dalam waktu bersamaan, yang paling kesohor, dan akrab di telinga kita tentu saja ada Gabriel Garcia, Fuentes, Juan Rulfo, atau Octavio Paz.

Bahkan, pada titik tertentu, saya kerap membayangkan Banten, atau daerah lain di Indonesia, sebagai Meksiko. Itu sejenis khayalan yang muskil tergapai dalam waktu dekat—tentu saja. Tetapi, bukankah tak elok menyandingkan ulat yang tampak muda, dengan kepak sayap kupu-kupu yang tampil memukau. Metamorphosa dan proses panjanglah yang mengubah citraan itu secara *an sich*. Banten yang “Muda” bisa menjadi *Meksiko* setelah menaklukan tebing curam. Dan

¹Dari judul puisi Chairil Anwar, Yang Terampas dan Yang Terputus (dalam *Kerikil Tajam dan Yang Terampas dan Yang Putus*)

²<http://sastraalibi.blogspot.com/2015/01/sepuluh-perintah-kepada-penulis-muda.html?m=1> diakses pada tanggal 18 Oktober 2019

itu—sekali lagi—bukan saja perkara pelik, tetapi juga masygul terlaksana jika kita tak segera berbenah.

Akses Pada yang ‘Lampau’

Yang mula-mula perlu kita benahi adalah akses terhadap bacaan di masa lampau. Masih meminjam gagasan Fuentes, yang ceramahnya saya nukilkan di atas, sastra melihat sejarah, dan sejarah mensubordinasikan diri kepada sastra sebab sejarah tak mampu melihat dirinya sendiri tanpa bahasa.

Jika roman *Tetralogi Pulau Burukarangan* Pramoedya Ananta Toertak pernah dituliskan—atau meledak menjadi abu di ujung senapan tentara, kita akan sedikit kelimpungan mencari akar pembentukan Bangsa Indonesia pasca kolonialisme Hindia-Belanda. Seandainya tokoh Wak Katok dalam Novel *Harimau! Harimau!* tak pernah melintas dalam benak Mochtar Lubis, besar kemungkinan kita akan sedikit luput pada dosa besar Orde Baru yang alpa kita percakapkan di ruang publik. Dan, apabila masyarakat adat Sunda-Baduy atau Kanekes tak meleakangkan tradisi sastra lisan, baik berupa *mantra* atau *rajab* yang kental dengan unsur magis itu, sudah barang tentu kita akan terasing atas satu rekaman realitas sosial yang terjadi di masa lampau.

Memang benar, jati diri Banten sebagai sebuah ‘Bangsa’ telah lama meranggas dalam puing kejayaan Banten Girang atau Kesultanan Banten. Kita bisa meminjam gagasan dari Ben Anderson—seorang Indonesianis—tentang konsep *Citizenship* sebagai satu bentuk komunitas yang dibayangkan.

Tetapi di lain sisi, yang tak boleh juga kita abaikan, sebagai satu bentuk wilayah administratif yang otonom, Banten melalui “Undang-Undang no 23 tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten”, harus kita lihat—secara objektif—sebagai Provinsi dengan usia yang relatif muda, sama seperti Kepulauan Bangka Belitung, Gorontalo, Riau, Sulawesi Barat dan Kalimantan Barat. Dan upaya untuk mencari satu pijakan Kebudayaan yang ajeg, oleh Dinas terkait—meski belum mencapai titik yang membahagiakan—tetap layak kita apresiasi.

Dengan dominasi tradisi sastra-lisan yang cukup kental, Banten pasca-provinsi belum juga mampu mengarsip-dokumentasikan nilai sosio-historis atas kreasi budaya yang pernah hidup di tengah masyarakat kita. Ambil satu contoh, siapa di antara kita yang menghafal—atau paling minimal mengetahui—sebuah prosa naratif berjudul *Hikayat Dewa Kaladri* yang lazim dilinsankan

masyarakat adat Sunda-Baduy? Mungkin hanya sepersekian orang, dan pada merekalah kita musti menaruh topi sebagai simbol penghormatan.

Suatu ironi memang, mengingat alpanya buku klasik Banten hadir di tengah-tengah kita, juga minimnya upaya dokumentasi atas sastra lisan. Selain kebutaan terhadap sejarah dan nilai kearifan lokal, dampak paling riskan adalah terputusnya mata rantai kerja kepenulisan. Pentingnya proses pembacaan terhadap buku klasik, bagi saya berlaku selaras antara penulis-pembaca. Sebagai satu relasi singular—sonder industri penerbitan buku—anantara keduanya.

Dalam esai bertajuk “*Why Read The Classics*”³—terbit pertama kali di “L’Espresso” edisi 28 Juni 1981 dengan judul bahasa Italia—Italo Calvino berusaha mendaur ulang makna ‘Buku Klasik’ dalam 14 definisi, dan pada pengertian ke-12, ia menggambarkan dengan “Karya klasik adalah buku yang datang sebelum karangan klasik lainnya; tapi barang siapa telah membaca yang pertama, lantas ia membaca yang berikutnya, langsung saja ia dapat menandainya dalam struktur pohon keluarga.”. Setali tiga uang, makna itu tak jauh berbeda dengan anggapan Fuentes bahwa penulis di hari kemarin menjadi penulis di hari ini, dan penulis hari ini menjadi penulis hari esok. Yang tak kalah penting, pembaca tahu masa depan. Pembaca *Don Quixote* berikutnya, sama dengan pembaca pertama *Don Quixote*.

Sebagai struktur pohon keluarga, jelas belaka bahwa Sulaiman Djaya atau Niduparas Erlang—sekedarnya menyebut salah dua nama, dari sekian banyak pelaku sastra di Banten—lahir dari ‘rahim’ Max Havelar, pun sebaliknya. Dan ibarat silsilah pohon keluarga, ingatan tentang leluhur itu seolah terputus oleh kegagapan kitayang tak termaafkan. Atau justru, corak tradisi Banten serupa Beringin dengan akar gantung, tak menancap pada inti Bumi, tetapi saling-silang di udara. Hal semacam itu tentu saja bisa menjadi pertanda buruk sekaligus baik bagi keragaman estetis yang ada, tergantung dari sisi mana kita memberi penilaian.

Sejujurnya, selain hal-hal yang saya kemukakan di atas, dan kenyataan bahwa kesastraan Banten masih tergojoh-gojoh untuk mendapat tempat dalam konstelasi Sastra Indonesia, yang selalu saya cemas adalah trend pertumbuhan Banten—sebagai satu daerah—melulu tampak seragam dengan daerah-daerah lain. Seolah tak ada garis demarkasi—yang padanya ditentukan oleh identitas kultural—antara Banten dan wilayah lain. Seluruhnya lebur dan takluk pada satu tatanan yang ‘*mapan*’ itu. Kota yang terjebak pada sengkabut nilai dan tanda, yang laju kembangnya bergantung pada kehendak ‘modal’.

³<http://lakonmassa.blogspot.com/2016/11/bacalah-karya-klasik.html> Diakses pada tanggal 19 Oktober 2019.

Dan, saya kerap membayangkan masing-masing dari kita berdiri di ujung jalan raya—apakah jalan raya memiliki ujung?—lalu menjelma *aku-lirik* pada puisi berjudul *Mitos-mitos kecemasan* gubahan Afrizal Malna;

*Negeri kami menunggu hotel-hotel bergerak membelah waktu,
mengucap diri dengan bahasa asing. O, impian yang sedang
membagi diri dengan daerah-daerah tak dikenal, siapakah
pengusaha besar yang memborong tanah ini. Kami ingin tahu
di mana anak-anak kami dilebur jadi bensin. Jalan-jalan
bergetar, membuat kota-kota baru sepanjang hari.*

Intertekstual dan Pengarsipan

Salah satu kawan saya, yang kini bergiat di Jogja, pernah mengungkapkan sejenis romansa dan *kekangenan* terhadap nama besar Persada Studi Klub (PSK) asuhan Umbu Landu Paranggi, yang pada tahun 60 hingga 70-an pernah menggedor kesastraan melalui *Mingguan Pelopor Jogja* dan aksi-aksi ‘menggelandang’ di Malioboro. Tentu saja ia bukan eks-PSK, dan rasa kangen yang tak tertanggungkan itu timbul sebab proses pembacaannya atas karya beberapa anggota PSK seperti Emha Ainun Nadjib dan Mustofa W. Hasyim. Meski jarak antar generasi itu sudah terpaut beberapa dekade, tetapi kesadaran akan tradisi yang pernah hidup tetap membekas.

Atas kasus kawan saya itu, saya teringat pada esai Ts Eliot yang pernah dipublikasikan seabad lalu, berjudul “*Tradition and Individual Talent*” (1991) sebagai upaya mengungkap posisi pengarang dalam sejarah sastranya. “*Tak ada penyair atau seniman dalam bidang apapun, yang memiliki maknanya sendiri. Penting tidaknya dia, apresiasi atasnya, dilihat berdasarkan relasinya dengan para penyair yang telah mati*”. Ungkapan Eliot senada dengan apa yang diyakini oleh Saut Situmorang, bahwa setiap teks adalah sebuah penulisan kembali atas teks-teks lainnya. Sebuah teks tak dapat berfungsi dalam kesendiriannya, terkucil dari teks-teks lainnya.⁴

Oleh sebab itulah, pendokumentasian atas produk lisan-tulisan layak dijadikan prioritas sebagai bentuk penunjang proses kreatif. Pantun, rajah, mantra, dan dongengan yang pernah beredar haruslah dituliskan. Sebab kita tahu, tradisi melisankan perlahan mulai lenyap.

⁴Saut Situmorang, *Politik Sastra, Edisi Kedua* (Jogjakarta: Jual Buku Sastra, 2008) hal.154

Dua tahun terakhir ini, Kabupaten Lebak bekerja sama dengan Platform Indonesiana, rutin menggelar *Festival Seni Multatuli* terhitung semenjak 2018-2019, sebagai upaya mengelaborasi kearifan lokal dalam sebetuk Puisi dan Prosa yang dibukukan, juga merekonstruksi jagat pemikiran Max Havelar. Atas kerja-kerja semacam itulah tradisi tetap menyala. Pun dengan penggunaan bahasa daerah, seperti yang dilakukan Rois Rinaldi melalui *Beluk (2019)* yang menggunakan bahasa Jawa-Banten sebagai medium ekspresi, atau forum Kamus Sunda Banten (Ocit Abdurosyid, dkk) yang tetap melanggengkan bahasa sunda sebagai ragam cakap sehari-hari.

Kelak, eksperimentasi estetik—baik bentuk atau isi, prosa atau puisi—akan bermunculan dan memiliki pijakan yang utuh. Sejarah akan mencatat kelahiran Toto ST. Radik atau Chavcay Syaifullah, dengan narasi juga suara lain, dalam tubuh lain, tetapi masih berasal dari Banten.

Madura telah melakukan itu melalui lembaga dokumentasi “Arsip Puisi Penyair Madura se-Indonesia (APP-MI)”. Meski dilakukan secara swadaya, mereka telah berhasil melacak, mengumpulkan lalu mengklasifikasi sejumlah puisi, dari angkatan 60 hingga yang paling mutakhir. Mereka aktif ‘menjemput puisi’ yang bertebaran di koran, jurnal, majalah atau antologi bersama, lalu mengabadikannya dalam website www.arsippenyairmadura.com yang dikelola. Dan hasilnya, penyair-penyair muda Madura kini cukup berlimpahan muncul, baik dalam tingkatan lokal maupun nasional. Sesekali kita bisa mengunjungi website itu untuk memahami betapa gencarnya proses terjal dilakoni.

Ruang Apresiasi dan Kanon (?)

Masih mencuri pandang pada Jogja. Provinsi ini memiliki ruang apresiasi sastra dan seni yang begitu melimpah. Mulai dari Koran; *Kedaulatan Rakyat, Minggu pagi, Bernas*. Majalah Sastra; *Basis, Djakalodang* dan *Mekarsari* (berbahasa jawa), *Citra* (terbitan Dewan Kesenian Provinsi DIY). Jurnal Kesenian; *Seni* (terbitan ISI). Media elektronik; *TVRI Stasiun Yogyakarta, RRI Nusantara II*. Kantor yang mengurus kesenian; *Bidang Kesenian, Dinas P dan K, Taman Budaya Yogyakarta, Balai Bahasa, Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional*. Lembaga kajian bahasa Jawa; *Javanologi*.⁵ Bahkan, industri penerbitan buku, perguruan tinggi, komunitas sastra dan lembaga-lembaga lain turut menunjang stereotype bahwa Jogja adalah gudang bagi orang-orang yang hendak mempelajari sastra.

Seperti dua kutub yang bersebrangan, bagi Banten berlaku kebalikannya. Sepengetahuan saya, dewasa ini tak ada satupun koran cetak yang menyediakan ruang pemuatan karya sastra.

⁵ Bakdi Soemanto, dkk. *Membaca Sastra* (Yogyakarta, Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 2012) cet. 1, hal. 75

Dengan alasan berkurangnya oplah, koran-koran lebih senang memenuhi lembarnya dengan iklan-iklan baris. Tentu saja itu kebijakan manajemen perusahaan, meski sangat disayangkan.

Sebagai upaya publikasi, koran tetap diperlukan, sebab proses kuratorial yang diterapkan sedikit banyak menjadi stimulus bagi para penulis. Dan pembaca, selain mendapat aspek hiburan, juga disodorkan pandangan terhadap dimensi lain dari realitas sosial yang tak nampak pada berita-berita. Dinas terkait setidaknya bisa meniru langkah yang ditempuh *Kantor bahasa Sulawesi Tenggara*. Mereka menjalin kerjasama dengan *Koran Rakyat Sultra* untuk menghadirkan Rubrik *Bahasa, Sastra dan Budaya*. Koran itu membuka partisipasi bagi seluruh Warga Negara Indonesia, tetapi satu pekan dalam satu bulan, khusus diisi oleh penulis lokal.

Sekedar menyebut beberapa media—non koran—di Banten yang menyediakan ruang apresiasi sastra, media daring; *kurungbuka.id*, *Biem.co*, dll. Majalah; *Kandaga* (terbitan Kantor Bahasa Banten). Di luar itu, penulis-penulis Banten yang kalap bersaing di koran Nasional, musti memutar otak mengirim ke media lokal di luar Banten.

Selain ruang apresiasi, saya kerap membayangkan Banten memiliki semacam kanon sastranya sendiri. Dengan luas geografis dan jumlah penulis yang terbatas, upaya *mengkanonkan* sastra Banten, baik yang menggunakan bahasa nasional atau lokal sebagai media ekspresi, tak akan sesulit penyusunan kanon sastra Indonesia—meski gesekan politik sastra tetap mungkin terjadi.

Jika merujuk pada bahasa asalnya yaitu Yunani, kanon berarti buluh atau tongkat yang dipergunakan untuk mengukur. Atau jika dalam konteks sastra, meminjam definisi dari Ayu Utami, kanon adalah daftar atau sekumpulan bacaan standard wajib. Dengan demikian, kita tak akan kesulitan untuk mencari daftar referensi karya sastra dengan nilai estetika tinggi.

Upaya semacam itu, bisa diprakarsai oleh perorangan, seperti yang dilakukan Ajip Rosidi; *Ikhtisar Sejarah Sastra Indonesia* (1969). A. Teeuw; *Pokok dan Tokoh dalam Kesusastraan Indonesia Baru* (1959). Atau, Jassin; *Kesusastraan Indonesia di Masa Jepang* (1948), *Gema Tanah Air* (1948), *Pujangga Baru* (1963) dan *Angkatan 66* (1968). Juga dilakukan oleh lembaga dan instansi dari pemerintah.

Kanon sastra Banten—dan beberapa poin yang telah saya urai di atas—memungkinkan kita, mendapat rujukan dan sebuah pengarsipan yang bersifat koheren dengan mutu karya, juga periodisasi yang utuh. Dan, menghindarkan kita menjadi yang terasing dan putus dalam akar tradisi dan kreasi sastranya sendiri.

Serang, 19 Oktober 2019